



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : MARWAN
- Jabatan** : KEPALA DINAS
- NHK** : 407098

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 342.500.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 42.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 53.000.000

- MOTOR, YAMAHA 28D(MIO/AL115S)/AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
- MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO NC12AF2CBIAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 34.204.067

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 429.704.067

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 429.704.067

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SALAHUDDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 866217

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>600.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.187.900</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>770.187.900</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>770.187.900</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : BUSTAMAM
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 408732

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>260.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>50.500.000</b>
1. MOBIL, HONDA MINIBUS/JAZZ 1,3A Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 31.500.000		
2. MOTOR, HONDA F1CU2N4/L0A Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>986.865</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>311.486.865</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.486.865</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUNTASIR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 407474

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **4.000.000.000**

1. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 2025 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **144.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER GRAND UF Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG STANDAR KF 50 (PICK UP) Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, TVS N 100 AT (SOLO) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



4. MOTOR, HONDA VARIO K1 H 02N14L0/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOTOR, HONDA BT3M/T SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
6. MOTOR, HONDA A5C02R37 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>87.969.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>23.015.200</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>4.254.984.200</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>4.254.984.200</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AMRIZAL**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **667649**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.510.300.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 623 m2/36 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 168.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 993 m2/36 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 1.092.300.000		
3. Tanah Seluas 90000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 4.625.000.000		
4. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA PIDIE, WARISAN Rp. 1.625.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>132.500.000</b>
1. MOTOR, HONDA NC110A1C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000		
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T Tahun 2012, WARISAN Rp. 105.000.000		
3. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000		
4. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>941.673</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.643.741.673
III. HUTANG	Rp.	438.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.205.741.673

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIZKI SAPUTRA  
2. Jabatan : BENDAHARA  
3. NHK : 952495

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	5.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
5.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	1.800.000
<b>D. SURAT BERTHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	5.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.300.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	12.300.000

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.